BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah (Nunuy Nur Afiah, 2009: 4). Anggaran digunakan sebagai pedoman kerja sehingga proses penyusunannya memerlukan organisasi anggaran yang baik, pendekatan yang tepat, serta model-model perhitungan besaran (simulasi) anggaran yang mampu meningkatkan kinerja pada seluruh jajaran manajemen dalam organisasi (Nasution, 2009). Diharapkan dengan adanya anggaran ini mampu meminimalisir beberapa kelemahan yang ada pada anggaran (Andriyani Nenobals, 2013).

Penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang berbeda antara sektor swasta dengan sektor pemerintah, termasuk diantaranya pemerintah daerah (Mediaty dan Syarifudin, 2010). Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya (Ramlah Basri, 2013). Karena itu, bagi perusahaan proses penyusunan anggaran menjadi hal penting yang harus diperhatikan agar dapat mencapai tujuan perusahaan (Stefani dan Stephana, 2011).

Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2005: 61). Sebelum anggaran disiapkan, organisasi seharusnya mengembangkan suatu rencana strategis. Rencana strategis yang dituangkan dalam target tahunan pada akhirnya selalu dievaluasi dan diperbaiki terus menerus (Deputi IV Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2005). "Hal ini penting karena anggaran, sebagai rencana satu periode, memiliki sifat untuk jangka pendek. (Hansen dan Mowen, 2004: 1)

Begitupun halnya dengan pembangunan di bidang Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan sebagai salah satu kekuatan utama terhadap perkembangan ekonomi di Kota Bandung, sebagaimana di amanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2013-2018) diperlukan pemikiran dan rancangan strategi yang cermat dan akurat guna mewujudkan capaian-capaian target yang telah di tetapkan, melalui Rencana Strategis Pembangunan yang didalamnya berisi Visi dan Misi Pembangunan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung guna mendukung terealisasinya Visi dan Misi Kota Bandung yang diselaraskan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional maupun kebijakan Provinsi Jawa Barat.

Selain itu sistem anggaran memberikan beberapa kelebihan untuk suatu organisasi. Menurut Hansen dan Mowen (2004: 1), kelebihan dari sistem anggaran diantaranya anggaran mendorong para manajer untuk mengembangkan arahan umum bagi organisasi, mengantisipasi masalah, dan mengembangkan kebijakan untuk masa depan. Kelebihan lain adalah anggaran dapat memperbaiki

pembuatan keputusan. Anggaran juga memberikan standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya organisasi dan memotivasi karyawan. Dalam pelaksanaannya, perubahan-perubahan atas rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya lazim dilakukan (Haryo Kuncoro, 2009). Sehingga semua program membutuhkan biaya untuk menunjang program (Ramlah Basri, 2013). Menurut Darmawel Ahmad (2015) dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaannya kadang kala mengalami hambatan seperti kurang akurat mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa, belum akurat dalam penyusunan belanja dukung seperti Tenaga Ahli, Panitia pengadaan barang dan jasa, serta Bantek (Bantuan Teknis) untuk pekerjaan. Untuk itu dibutuhkan pengalokasian biaya yang benar agar menghasilkan anggaran yang sesuai untuk kebutuhan tersebut (Ramlah Basri, 2013).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan; alat. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,proyek). Antara sarana dan prasarana tidak terlalu jauh berbeda, karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk membedakannya, sarana lebih ditujukan kepada benda-benda yang bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak. Pengelolaan (manajemen) perlengkapan (sarana dan prasarana) merupakan proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, pemeliharan, penghapusan, dan pengendalian logistik atau perlengkapan. (soebagio, M.I. 1988)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas Penyusunan Anggaran di Dinas Koperasi UKM dan Perindag dengan mengambil judul **"PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BANDUNG".**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Maksud dari penulis mengadakan kerja praktek ini adalah memenuhi salah satu syarat Mata Kuliah Kerja Praktek dan tujuan penulis mengadakan kerja praktek ini yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran sarana dan prasarana aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perindag Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penyusunan anggaran sarana dan prasarana aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perindag Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perindag Kota Bandung dalam mengatasi hambatan dalam proses Penyusunan Anggaran Sarana dan Prasaarana Aparatur.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan kerja praktek ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi penulis, dan bagi instansi yang terkait:

1. Bagi Penulis

Hasil kerja prktek ini dapat digunakan sebagai bahan masukkan dan perbandingan yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi dasar yang memadai tentang prosedur dan sistem pencatatan keuangan daerah di Dinas Provinsi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perindag Kota Bandung.

2. Bagi Instansi

Diharapkan hasil kerja praktek ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi serta masukan positif bagi instansi yang berhubungan dengan Prosedur Penyusunan Anggaran Sarana dan Prasarana Aparatur.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Dapat menjadi tambahan referensi dan tambahan informasi mengenai prosedur penyusunan anggaran sarana dan prasarana aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perindag Kota Bandung, serta menambah pengetahuan rekan mahasiswa lain yang kelak akan membutuhkannya.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Kegiatan Kerja Praktek dilakukan di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Kawaluyaan No. 2 Bandung.Telepon Kantor : (022) 7308358.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun pelaksanaan Kerja Praktek dimulai pada tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015.

Tabel 1.1

Aktivitas Kerja Praktek

NO	AKTIVITAS	TAHUN 2015						
		BULAN						
		Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pengajuan Kerja Praktek	■						
2	Pelaksanaan Kerja Praktek	■	■	■				
3	Pengumpulan Data			■	■	■		
4	Penyusunan dan Bimbingan Kerja Praktek				■	■	■	■
5	Pengumpulan Laporan Praktek							■

Tabel 1.2

Jam Kerja Praktek

Hari	Keterangan	Jam Kerja	Istirahat
Senin – Kamis	Hari Biasa	07.30 - 16.00	12.00 - 13.00
	Bulan Ramadhan	07.30 - 14.30	12.00 - 13.00
Jum'at	Hari Biasa	07.00 - 16.00	11.30 - 13.00
	Bulan Ramadhan	07.30 - 14.30	11.30 - 13.00
Sabtu – Minggu	Libur		